

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat (3) undang-undang dasar 1945 hasil amandemen, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang menentukan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketentuan konstitusi tersebut berarti bahwa dalam praktek ketatanegaraan Indonesia seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum dan harus menjadi pedoman semua aktivitas bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sebagai bagian dari proses penyelenggaraan negara.

Menurut Utomo sebagaimana dikutip oleh Anwar dan Adang (2009:116-117), setiap negara hukum memiliki aparat penegak hukum termasuk kepolisian negara, yang secara universal mempunyai tugas dan fungsi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku untuk mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, fungsi dan tugas kepolisian negara Republik Indonesia telah diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan. Institusi kepolisian juga terikat pada aturan-aturan hukum dan prosedur-prosedur tertentu, serta dikontrol dan tanggung jawab kepada hukum.

Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat dengan POLRI dalam kaitannya dengan pemerintahan adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan

kepada masyarakat, yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negara yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kaitannya dengan kehidupan bernegara kepolisian merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selaku aparat penegak hukum terdepan dengan segala aktivitas yang terjadi di masyarakat khususnya mengenai masalah kejahatan, kesan atau citra kepolisian hampir di semua daerah di Indonesia tetap masih belum membaik. Keadaan ini tampaknya akan selamanya demikian, sekalipun upaya dari pihak kepolisian untuk memperbaiki citra negatif tersebut. Slogan Polisi sebagai pengayom masyarakat, tampaknya belum dirasakan secara efektif oleh warga masyarakat, hal ini sangat jelas terbukti dengan semakin meningkatnya aksi-aksi kriminal yang terjadi sekarang ini.

Polisi yang seharusnya sebagai pelindungan belum sesuai dalam menjalankan tugas dan fungsi dari polisi itu sendiri. Citra negatif kepolisian tersebut seolah-olah sulit diperbaiki dan disembunyikan dari masyarakat. Hal tersebut terjadi karena semakin maju dan berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi, baik itu media cetak maupun media elektronik yang hampir setiap hari memuat tentang berita-berita yang mengkritisi kinerja kepolisian. Adanya pemberitaan tentang peran kepolisian dalam menjalankan tugasnya yang

melenceng dari peraturan perundang-undangan semakin menambah buruk citra kepolisian dimata masyarakat.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) merupakan salah satu mata pelajaran yang mempelajari tentang peran Kepolisian Negara Republik Indonesia. Materi ini diajarkan pada kelas XI SMA/SMK. Pada materi ini dijelaskan beberapa peran kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Selain itu, dalam bidang penegakan hukum, khususnya yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana, kepolisian sebagai penyidik utama yang menangani setiap kejahatan secara umum dalam rangka menciptakan keamanan dalam Negara.

Kenyataan yang terjadi saat ini sangat bertentangan dengan isi dari materi dalam buku tersebut. Banyak anggota kepolisian yang masih belum bisa menjalankan fungsi dan perannya dengan baik dan benar. Kepolisian yang seharusnya berperan sebagai pihak penegak hukum justru memanfaatkan statusnya tersebut untuk melanggar hukum, membela pihak yang salah asalkan ada kompensasi dan menelantarkan pihak yang benar yang mestinya mendapatkan pembelaan. Penyelewengan-penyelewengan atas peran dan wewenang tersebut membuat citra kepolisian masih dipandang buruk oleh sebagian besar masyarakat Indonesia.

Kesenjangan antara teori yang ada dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik

Indonesia kelas XI kurikulum 2013 dengan praktik yang ada dilapangan sangat terlihat jelas dalam kehidupan nyata. Berdasarkan kenyataan yang ada bahwa terjadi kesenjangan antara teori dan praktik tentang peran kepolisian dalam menjamin keadilan dan kedamaian, maka peneliti berminat untuk melakukan penelitian sekaligus bahan penyusunan skripsi dengan judul “Kesenjangan Peran Polri (Analisis Isi Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kelas XI SMA/SMK Kurikulum 2013 dan Berita Media Internet atau *Online*)”.

B. Rumusan Masalah

Melakukan penelitian harus menggunakan perumusan masalah, untuk mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran polri pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewaraganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas XI kurikulum 2013?
2. Bagaimanakah peran polri pada materi berita di media internet/*online*?
3. Bagaimanakah kesenjangan peran polri yang terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas XI kurikulum 2013 dengan peran polri yang terdapat pada materi berita di media internet/*Online*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan salah satu arah dari kegiatan penelitian, maka tujuan harus ditentukan. Terkait dengan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan peran polri pada buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas XI kurikulum 2013.
2. Untuk mendeskripsikan peran polri pada materi berita di media internet/*online*.
3. Untuk mendeskripsikan kesenjangan peran polri yang terdapat dalam Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas XI kurikulum 2013 dengan peran polri yang terdapat pada materi berita di media internet/*online*.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki beberapa manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bahwa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pengembangan salah satu materi tentang peran polri.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi peneliti sebagai calon pendidik, sehingga dapat ditransformasikan kepada peserta didik serta masyarakat Indonesia pada umumnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyebarluaskan informasi mengenai kesenjangan peran polri yang terdapat dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia kelas XI kurikulum 2013 dengan media internet/*online*.
- b. Dapat digunakan sebagai pedoman untuk penelitian selanjutnya yang sejenis.

E. Daftar Istilah

Untuk mempermudah para pembaca dalam memahami ini skripsi, peneliti perlu mencantumkan daftar istilah yang digunakan. Adapun daftar istilah dalam skripsi ini yaitu:

1. Polri, merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas pokok di bidang penegakan hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pelayanan, perlindungan serta pengayoman masyarakat (Sutadi dkk, 2012:1)
2. Peran, adalah perilaku menjalankan kewajiban dan menuntut hak yang melekat pada status (alamsyah, 2014).
3. Kesenjangan, merupakan perihal yang bersifat atau berciri tidak simetris ataupun berbeda antara satu dengan lainnya (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, 2008:1274).

4. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, merupakan wahana untuk mengembangkan dan melestarikan nilai-nilai moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia (Darmadi, 2013).